



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralitas Atau Gerakan Politis

Elis Mardianti

Universitas Airlangga, Surabaya

elis.mardianti-2019@fisip.unair.ac.id

How to Cite: Mardianti, E. (2022). Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralitas Atau Gerakan Politis. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2 (2): 82-103. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.82-103>

Abstract

Students as part of the intellectual group in Indonesia with their various movements have a very crucial role. In the three orders of power, students always show their existence in the national political process. In the old order era, students became one of the political forces with the presence of various organizations that actively participated in providing input to the current political system. Continuing with Suharto's rule, students with social movements were one of the reasons for the fall of the authoritarian regime that had been in power for a long time. The dynamics continue. After the change of government structure, even though the student movement of the reform order was often considered lost, it still showed its existence by providing input on government policies. Movements in this reform era often brought up quite new issues related to the environment or human rights. This study discusses the direction of the student movement with its various dynamics that occur in the vortex of the three orders of power. Social movement theory is used as an analytical tool in this research. This study also uses descriptive qualitative research methods and literature review techniques with primary data sources obtained through interviews with students who are actively involved in the student movement and secondary data whose sources are obtained from books, scientific articles, or mass media. The conclusion obtained from the results of this study is that the various movements launched by students are often moralist movements, although the realm of the movements often leads to the political realm. Students tend to move on the will and concerns of the people without trying to position themselves to achieve certain political power or position.

Keywords: *moralist movement; orders of power; social movement; student movement*

Abstrak

Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok intelektual di Indonesia dengan berbagai pergerakannya memiliki peran yang sangat krusial. Dalam tiga orde kekuasaan sekaligus, mahasiswa selalu menunjukkan eksistensinya dalam proses perpolitikan nasional. Era orde lama, mahasiswa menjadi salah satu kekuatan politik dengan hadirnya berbagai organisasi yang turut aktif memberikan input pada sistem politik yang berjalan. Berlanjut pada orde kekuasaan Soeharto, mahasiswa dengan gerakan sosial yang dilakukan menjadi salah satu sebab tumbangannya rezim otoriter yang cukup lama berkuasa. Dinamika terus berlanjut. Pasca peristiwa pergantian

struktur pemerintahan tersebut, pergerakan mahasiswa orde reformasi sekalipun sering dianggap kehilangan arah tetap menunjukkan eksistensinya dengan memberikan input pada kebijakan pemerintahan. Gerakan pada era reformasi ini kerap kali membawa isu-isu yang cukup baru baik terkait lingkungan ataupun HAM. Penelitian ini membahas mengenai arah gerakan mahasiswa dengan berbagai dinamikanya yang terjadi dalam pusaran tiga orde kekuasaan. Teori gerakan sosial digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik kajian pustaka dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada mahasiswa yang terlibat aktif dalam gerakan mahasiswa dan data sekunder yang sumbernya diperoleh baik dari buku, artikel ilmiah, ataupun media massa. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini yakni berbagai gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa seringkali bersifat gerakan moralis, meskipun ranah pergerakannya seringkali menuju pada ranah yang politis. Mahasiswa cenderung bergerak atas kehendak dan kerisauan rakyat tanpa berusaha menempatkan diri untuk mencapai kekuasaan atau kedudukan politik tertentu.

Kata kunci: gerakan moralis; orde kekuasaan; gerakan social; gerakan mahasiswa

I. PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan kelompok intelektual di Indonesia, khususnya mahasiswa, tidak hanya sekadar berkutat atas problem akademis belaka. Berbagai peristiwa krusial turut menyertakan mahasiswa sebagai aktor penggerakannya. Hal ini tentu saja tidak tanpa sebab, (Lipset & Altbach, 1969) menuturkan bahwa mahasiswa memiliki tendensi secara aktif untuk memberikan respon terhadap *trend* politik serta ikut serta dalam melakukan perubahan dibanding dengan populasi kebanyakan. Memperkuat hal tersebut, Lewis Coser sebagaimana dikutip oleh (Budiman, 1978) juga menuturkan bahwa kaum intelektual adalah mereka yang tak pernah merasa puas. Hal tersebut berarti bahwa mahasiswa memiliki kecenderungan untuk selalu mempertanyakan sekaligus mengejar kebenaran yang lebih luas. Dalam negara berkembang, secara spesifik mahasiswa mempunyai peran dan kedudukan yang esensial sebab mereka sebagai mahasiswa merupakan kelompok elit yang pertama kali diperkenalkan pada

modernisasi (Rosyad, 2006).

Dengan memiliki beberapa kecenderungan serta kelebihan daripada masyarakat kebanyakan, mahasiswa akhirnya turut dalam berbagai macam gerakan serta aktivitas politik. (Curran & Renzetti, 1990) menyebutkan bahwa mahasiswa memiliki sejarah panjang dalam dunia aktivisme sebagai kelompok politik penekan. Lipset yang kemudian dikutip oleh Philip Burgess juga (Hofstetter, 1971) menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa muncul 'pembangkangan' oleh kelompok intelektual. Beberapa di antaranya yakni hadirnya permasalahan institusional yang spesifik seperti ketidakmampuan administrasi, permasalahan sosial politik yang luas seperti perang dan rasisme domestik, dan penyebab generasi seperti penggunaan teknologi di kalangan pelajar. Dengan itu, Edward Shill dalam (Akbar, 2016) yang mengklasifikasikan mahasiswa sebagai kalangan intelektual dengan kepemilikan karakteristik khas atas fungsi dan tanggung jawab sosialnya, menuturkan terdapat sejumlah peran kaum intelektual

diantaranya turut menyediakan dan membangun kerangka nasional antar bangsa, menyebarkan tingginya nilai kebudayaan, membina keberdayaan dan kebersamaan, memainkan peran politik, serta mempengaruhi proses perubahan sosial. Arbi Sanit dalam kelima fungsi tersebut memandang bahwa mahasiswa sebagai kaum intelektual lebih banyak terlibat dalam tiga fungsi terakhir, utamanya melalui berbagai aktivisme gerakan yang dilakukan (Sanit, 1981).

Terkait dengan hal tersebut, Burgess & Hofstetter (1971) juga mengutarakan hipotesis terkait sebab munculnya gerakan mahasiswa diantaranya *critical*, *sympathetic*, serta *neutral*. *Critical* dalam hal ini dimaknai sebagai sebuah keadaan dimana terdapat problematika yang disebabkan karena meningkatnya ketidak-tanggungjawaban sosial sehingga berimplikasi atas muncul dan meningkatnya ketidakmakmuran, kesenjangan, serta kekacauan. Kedua, *sympathetic* melekat pada gejala gerakan mahasiswa yang mana kelompok intelektual ini merasa 'di-rejection' akibat perasaan paranoia serta kondisi yang mereka hadapi atas adanya 'hypercompetitive' baik dalam sistem sosial maupun sistem ekonomi. Terakhir, faktor *neutral* ini terkait dengan keberadaan dampak atau implikasi atas perubahan sosial yang terjadi secara masif dan menyeluruh seperti keberadaan pergeseran nilai agama, budaya, juga perkembangan atas teknologi. Maka dengan itu, dapat dilihat bahwa banyak sebab mengapa muncul sebuah situasi terjadinya 'pembangangan' dari

kelompok intelektual khususnya mahasiswa.

Pembangangan yang dilancarkan oleh kelompok mahasiswa ini kemudian tercermin dalam wujud sebuah tindakan kolektif yakni gerakan mahasiswa. Menegasi pandangan sebelumnya, Arbi Sanit sebagaimana dikutip oleh (Sulistyo, 1998) menyebutkan bahwa gerakan mahasiswa tersebut muncul sebab adanya perasaan yang kalut atas kondisi sosial dan ekonomi yang ada, meningkatnya kesenjangan sebagai dampak adanya ketidakadilan sosial, kebijakan dan keputusan pemerintah yang berpihak dan tidak adil sehingga menyebabkan ketidakpuasan terhadap penyelenggara negara, serta sistem politik yang cenderung non-demokratis. Dengan persepsi bahwa aksi atau gerakan mahasiswa lahir atas dorongan dan desakan untuk secara terus menerus berjuang demi nasib rakyat banyak (Ali, 1985), berbagai aliran dan kelompok mahasiswa yang terbentuk berdasar masing-masing ideologi gerakannya kerap kali turut serta melakukan aksi massa demonstrasi atau turun ke jalan untuk memperjuangkan tuntutannya.

Gerakan mahasiswa ini sendiri juga terdiri dari berbagai macam ideologi serta nilai yang dipercayai. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya berbagai macam organisasi serta kelompok mahasiswa berdasarkan nilai-nilai tertentu. Hal tersebut kemudian membuat terdapat beberapa perbedaan orientasi antara dalam hal tujuan dari suatu gerakan. Kendati (Lipset, 1968) menyebutkan bahwa kajian

mengenai gerakan cenderung lebih berfokus pada gerakan mahasiswa kiri, dengan menyebutkan bahwa mahasiswa *leftish* atau golongan kiri cenderung untuk menyakini bahwa mereka memiliki tugas untuk turut serta secara politik serta berpandangan bahwa universitas haruslah menjadi agensi dari modernisasi dan perubahan secara radikal, terdapat pula kelompok mahasiswa *rightish* atau golongan kanan yang cenderung konseratif maupun moderat. Dengan demikian, melihat sejarah dari gerakan mahasiswa di Indonesia dapat ditinjau dari sudut ideologis maupun nilai yang dianut oleh gerakan tersebut.

Peninjauan lebih dalam mengenai ideologi yang dianut dalam gerakan mahasiswa menjadi penting, dikarenakan gerakan mahasiswa di Indonesia tidaklah selalu bersifat tunggal dalam setiap pembabakan sejarahnya. Contohnya pada dekade 1960an, gerakan mahasiswa di Indonesia tidak hanya atau tidak selalu dimiliki golongan anti-komunis dan anti-demokrasi terpimpin, namun lahir juga gerakan mahasiswa yang mendukung Soekarno dengan kelompok mahasiswa yang berideologi komunis sebagai penyokongnya. Selanjutnya pada masa rezim orde baru berkuasa, kendati kecenderungan gerakan sama yakni guna melawan pemerintahan, lahir juga berbagai gerakan mahasiswa dengan pegangan ideologi yang beragam. Kemudian pasca terjadinya gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjadi salah satu penyebab perubahan struktur pemerintahan. Aksi demonstrasi di dekade tersebut atau pada

masa awal reformasi cenderung lebih beragam dengan melibatkan organisasi atau kelompok berbasis agama maupun nasionalis, serta yang cukup baru aksi-aksi dari gerakan mahasiswa pada dekade kedua orde reformasi cenderung terkait atas isu terbaru yakni gender, rasisme, kebijakan pemerintah, otonomi khusus, dan lain sebagainya oleh mahasiswa secara kolektif berdasarkan afiliasi ideologi dan politiknya.

Namun, dengan merujuk berbagai afiliasi ideologi tersebut, gerakan mahasiswa kemudian juga perlu untuk ditinjau kembali terkait dengan arah gerakan yang dilakukan. (Sanit, 1999) memandang bahwa gerakan mahasiswa terdiri dari dua arah yakni antara aksi moral dan aksi politik. Pada arah gerakan yang bersifat moralis, maka gerakan mahasiswa ini meletakkan gerakannya sebagai sebuah kekuatan yang menjadi motor dalam hadirnya perubahan. Terlebih ketika negara dengan institusi politik dan birokrasinya gagal menjalankan peran yang tepat sesuai dengan kewajiban dan tuntutan. Maka dengan itu, arah gerakan mahasiswa ini berfokus untuk meletakkan dan meluruskan kembali peran dan fungsi institusi yang ada. Sebab jika kondisi tersebut diabaikan dan tetap dibiarkan, maka penindasan terhadap rakyat terus menerus terjadi sehingga kesejahteraan dan keadilan tidak akan tercapai. Mahasiswa dengan gerakannya sebagai manifestasi gerakan moral ini memiliki karakteristik utama dimana kedudukan mahasiswa berada di luar institusi pemerintahan, sekalipun tetap melakukan satu fungsi yakni fungsi kontrol politik. Lalu, arah

gerakan yang kedua yakni arah gerakan yang cenderung politis, maka dapat dijabarkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut sama dengan gerakan yang memiliki arah sebagai gerakan moralis. Namun dalam gerakan politis ini disebutkan bahwa energi yang dihasilkan dari gerakan mahasiswa tersebut harus diletakkan sebagai kekuatan yang nyata dalam percaturan atau arena politik. Hal ini memiliki artian bahwa mahasiswa akan melakukan gerakannya dengan menempati kedudukan dalam institusi pemerintahan. Arah gerakan ini tentu memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan arah gerakan yang moralis. Gerakan yang bersifat politis lazimnya memiliki arah pada usaha dalam penciptaan gerakan atas sebab kepentingan politik tertentu sehingga mahasiswa cenderung harus memiliki sifat yang profesional sebagai politisi. Sedangkan dalam gerakan yang bersifat moralis, maka peran mahasiswa hadir sebagai komunikator dengan kegiatan-kegiatan yang cenderung memiliki sifat membela rakyat atas hadirnya penindasan dan melencengnya fungsi dan peran dari institusi pemerintahan. Gerakan moralis lebih jernih dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dengan membangun atensi melalui gerakan yang dilakukan (Usman, 1999). Tentu arah gerakan ini tampak dalam berbagai gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Dinamika-dinamika yang terjadi dalam berbagai gerakan mahasiswa tersebut menjadi latar belakang yang menarik untuk ditelisik menggunakan teori-teori gerakan sosial. Apalagi dalam studi gerakan sosial,

teori-teori dalam mengkaji sebuah gerakan terus menerus mengalami perkembangan sehingga kekayaan kajian teoritis menjadikan gerakan sosial tidak hanya dipandang sebagai bentuk praksis. Secara mendasar, gerakan sosial (*social movements*) merupakan suatu perilaku kolektif dengan maksud untuk mendorong perubahan pada tatanan sosial yang sudah ada. Perlu digarisbawahi bahwa gerakan sosial dilakukan secara kolektif atau bersama dan biasanya merupakan upaya untuk menentang keadaan sosial yang dinilai tidak mensejahterakan masyarakat ke arah perubahan sosial yang lebih baik. (Locher, 2002) dalam (Aribowo, 2020) menegaskan terdapat perbedaan antara gerakan sosial pada dalam masyarakat dengan berbagai perilaku kolektif lainnya yang terjadi di dalam masyarakat yakni terletak pada aspek pertimbangan (*deliberate*), daya tahan (*enduring*), dan pengorganisasiannya (*organized*). Studi terkait dengan gerakan sosial ini kemudian secara kategeris menurut (Singh, 2001) terbagi menjadi tiga bentuk yakni gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru (Sukmana, 2016). Dalam bentuk gerakan lama, teori psikologi sosial dominan mewarnai studi dalam kategori ini. Teori psikologi sosial menjelaskan dimana gerakan sosial dipandang dari sudut pandang dan aspek psikologis dari para pelaku gerakan. Bisa dari aspek kepribadian ataupun pola pemikiran yang tereduksi di dalam tubuh individu sehingga bisa mendorong suatu kegiatan kolektif. Dalam bentuk klasik ini, teori deprivasi relative termasuk didalamnya. *Relative Deprivation*

Theory atau teori deprivasi relatif menerangkan mengenai berbagai macam gerakan sosial yang terjadi dari berbagai macam kelas di masyarakat, seperti gerakan buruh dan petani, mahasiswa, serta masyarakat sipil lainnya yang mengalami fase kekecewaan terhadap realitas yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Deprivasi relatif tidak hanya menyangkut pada persoalan tujuan dan keinginan yang berusaha diperoleh namun juga berkaitan dengan tujuan yang menurut individu merupakan hak yang mesti dipenuhi. Kemudian dalam sudut gerakan sosial baru, aksi yang dilakukan sebagai manifestasi gerakan sosial lebih tertuju pada karakter gerakan yang post-material. Oleh karena itu, teori budaya banyak mempengaruhi dalam studi gerakan sosial baru. Sebagai contoh gerakan sosial baru tersebut ialah gerakan yang mengusung isu terkait otonomi khusus, LGBT, feminisme, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Keduanya ini kemudian dapat menerangkan sebab gerakan yang dilakukan mahasiswa sekaligus arah gerakan yang dilakukan, apakah gerakan sosial yang berdimensi gerakan sosial lama dan gerakan sosial yang berdimensi baru dalam pusaran tiga orde kekuasaan tersebut bersifat sebagai gerakan mahasiswa yang moralis ataupun gerakan mahasiswa yang cenderung politis.

Terkait dengan tema ini, secara empiris terdapat banyak penelitian yang menelisik terkait dengan gerakan mahasiswa diantaranya oleh (Akbar, 2016) dimana penelitian ini berusaha mengeksplorasi demokrasi sebagai faktor penting gerakan mahasiswa dengan

dampak perubahannya di Indonesia; (Jazimah, 2013) yang melakukan penelitian terkait gerakan mahasiswa dengan fokus pada peristiwa MALARI 1974; (Maiwan, 2016) yang mengulas tentang gerakan mahasiswa pada dekade 1990-an, utamanya terkait dengan represivitas rezim Soeharto. Dalam penelitian kali ini, fokus pembahasan tertuju untuk menelisik bagaimana gerakan mahasiswa dalam pusaran tiga orde kekuasaan yakni rezim orde lama, rezim orde baru, dan orde reformasi. Pertanyaan penelitian yang diajukan tersebut juga dikerucutkan untuk melihat dan menilik arah gerakan mahasiswa dalam tiga orde tersebut, dimana arah gerakan merupakan gerakan intelektual yang bersifat moralis ataukah gerakan yang cenderung bersifat politis.

II.METODE

Artikel ini menempatkan Gerakan Mahasiswa di Indonesia sebagai objek utama pembahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Melalui metode tersebut, penelitian dilakukan dengan penyelidikan terhadap makna sehingga menghadirkan pemahaman fenomena secara holistik. Hasil penyelidikan terhadap makna dan fenomena melalui metode ini kemudian dituangkan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Aminah, 2019), sehingga penelitian ini tidak berusaha untuk mencari hubungan antar variable yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang tidak diolah secara matematis. Data primer

diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan mahasiswa dengan kepemilikan kedudukan di organisasi mahasiswa sekaligus terlibat aktif dalam berbagai aksi Gerakan Mahasiswa. Sementara data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik kajian pustaka yang rujukannya berasal dari berbagai sumber baik media cetak seperti buku, media daring seperti e-book, artikel ilmiah yang berbentuk e-journal, maupun berbagai media massa yang terkait dengan topik Gerakan Mahasiswa. Dengan metode deskriptif kualitatif yang digunakan, maka pengoperasionalan datanya berkisar pada beberapa tahap diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penginterpretasian data, dan penarikan kesimpulan.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat Gerakan Mahasiswa dari Perspektif Gerakan Sosial

Gerakan mahasiswa tidak dapat sekadar dilihat dari sudut individu mahasiswa itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan gerakan mahasiswa merupakan gabungan dari berbagai macam kelompok mahasiswa yang tergabung untuk menuntut hal-hal tertentu. Oleh karenanya, teori gerakan sosial digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis untuk mengkaji gerakan mahasiswa dari setiap masa di Indonesia. Secara definitif, gerakan sosial dimaknai sebagai upaya dengan Tindakan yang dikehendaki sekelompok orang dengan tujuan mencapai sebuah perubahan tertentu (Sukmana, 2016). Setiadi dan Kolip (2013) menuliskan bahwa

gerakan sosial terdiri atas tujuh jenis, yakni gerakan protes, gerakan religius, gerakan perpindahan, gerakan komunal, gerakan ekspresif, gerakan regreasif, serta gerakan personal. Dalam hal ini, gerakan mahasiswa dalam konteks gerakan sosial dapat tergolong di antara beberapa jenis tersebut.

Orientasi gerakan dalam gerakan sosial ini sendiri bertujuan untuk mengartikulasikan beberapa tujuan eksplisit, seperti perubahan atas kebijakan di sektor negara, privat, norma budaya, serta mempengaruhi beberapa target secara tidak langsung (Meyer & Whittier, 1994). Lebih lanjut, gerakan sosial dapat dilihat dari bagaimana aksi publik mereka, serta dampak yang dihasilkan terhadap negara ataupun respon organisasi dalam menantang negara. Disebutkan bahwa gerakan ini dapat memberikan efek dari satu pihak ke pihak lainnya, sebagai respon kolektif, identifikasi potensi kekuatan, kerentanan dalam struktur politik, serta mempengaruhi peluang restrukturisasi politik di lingkup eksternal (Meyer & Nancy Whittier, 1994).

Gerakan sosial dapat lahir dari adanya deprivasi relatif, suatu kondisi di mana seorang individu terdapat pada situasi serba kekurangan serta kurang beruntung. Hal ini kemudian membuat terdapat perbedaan antara harapan yang dimiliki oleh seseorang terhadap kenyataan yang dihadapinya Davis dalam (Sarlito et. Al, 2009). Perbedaan tersebut kemudian menjadikan seseorang memiliki rasa ketidakpuasan atas apa yang sedang dihadapinya. Namun, Klandermans (2005)

menyebutkan bahwa ketidakpuasan ini tidak dapat dijadikan alasan tunggal mengapa seorang individu turut serta dalam gerakan sosial. Disebutkan bahwa ketika ketidakpuasan terhadap sumber daya dan peluang tertentu terjadi secara menyeluruh dengan melibatkan pihak lain, maka akan dapat terbentuk suatu identitas bersama bahwa mereka memiliki kesamaan ketidakpuasan, sehingga tergerak dalam melakukan tindakan kolektif (Klandermans, 2005).

Tilly (1978), Jenkins & Perrow (1977), dan Oberschall (1978) dalam Jenkins, (1983) menyebutkan bahwa adanya keluhan yang relatif konstan dari konflik kepentingan struktural yang dibangun dalam institusi sosial, dapat terbentuk dalam jangka panjang sebagai sumber sekaligus peluang kelompok maupun organisasi dalam melakukan aksi kolektif. Adanya perubahan dalam hubungan kekuasaan (Jenkins, 1983) atau adanya konflik struktural kepentingan, dapat dijadikan alasan mengapa terbentuk gerakan sosial. Gerakan sosial ini sendiri dapat terbentuk dengan mempertimbangkan beberapa hal. McCarthy dan Zald dalam (Jenkins, 1983) menyebutkan bahwa ketersediaan sumberdaya, seperti ketersediaan kader serta fasilitas pengorganisasian, akan menuntut *grievances* atau keluhan untuk dapat memenuhi kebutuhan dana akomodasi serta personel pendukung. Oleh karenanya, berbicara mengenai gerakan tidaklah sekadar membahas mengenai apa yang menjadi tuntutan dari gerakan tersebut, namun juga melihat ketersediaan serta kemampuan dari gerakan dalam

memobilisasi dan menggerakkan dirinya sendiri.

Secara spesifik, gerakan sosial dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis utama, yakni gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. (Wahyudi, 2010) dalam artikelnya berjudul 'Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani [studi kasus gerakan reklaming/ penjarahan atas tanah PTNP XII (Persero Kalibakar, Malang Selatan)]' menuliskan bahwa gerakan sosial lama berorientasi pada beberapa aspek seperti ekonomi dan keterkaitan dengan kebutuhan materi (Wahyudi, 2010). Sementara itu, gerakan sosial baru berhubungan dengan orientasi gerakan yang turut berjuang dalam isu-isu baru, seperti: *human rights* atau hak asasi manusia, keadilan dan persamaan hak yang biasanya menyangkut rasisme dan feminisme, lingkungan hidup, kebebasan, perdamaian, dan lain sebagainya (Wahyudi, 2010). Oleh karenanya, melihat gerakan mahasiswa dengan berbagai macamuntutannya, dapat dilihat sebagai gerakan sosial lama, ataupun gerakan sosial baru, tergantung dari isu apa yang sedang disuarakan. Sehingga dengan itu, gerakan mahasiswa dalam berbagai peristiwa dapat dilihat menggunakan teori-teori dalam kajian mengenai gerakan sosial dan politik.

Secara konkret, analisis tersebut dapat dilihat dari contoh-contoh pergerakannya. Salah satu gerakan sosial yang mana mahasiswa cukup dikatakan menjadi salah satu aktor gerakan yang cukup kuat yakni gerakan sosial yang dilakukan pada tahun 1974 yang berujung Tragedi Malapetaka 15

Januari (Malari 1974). Terjadinya peristiwa Malari yang mana mahasiswa banyak terlibat dalam pergerakannya ini mengingatkan peneliti pada asumsi-asumsi dasar salah satu teori gerakan sosial klasik yakni *Relative Deprivation Theory*. Dalam teori ini, tokoh-tokoh psikologi sosial seperti Ted Robert Gurr, Denton E. Morrison dan James Davis memberikan gambaran bahwa perilaku massa yang agresif muncul sebagai implikasi atas adanya frustrasi dalam masyarakat (Aribowo, 2020). Kekecewaan dan frustrasi tersebut disebabkan karena masyarakat mengalami suatu kesenjangan antara “nilai yang diharapkan” dengan “nilai kapabilitas”. Hal tersebut selaras dengan gambaran sebab terjadinya gerakan-gerakan mahasiswa yang berujung pada Tragedi Malari yang akan digambarkan secara singkat.

Pada tahun 1967-an, atas warisan era orde lama yang mana pertumbuhan perekonomian tidak mengalami kenaikan bahkan cenderung menurun, pemerintah orde baru kemudian gencar melakukan berbagai upaya dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang memiliki tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun berbagai kebijakan tersebut bercorak kapitalistik. Salah satu kebijakan yang diterapkan yakni kebijakan PMA atau kebijakan Penanaman Modal Asing yang bertujuan untuk menarik investor asing demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan PMA ini kemudian menimbulkan eksploitasi besar-besaran pada sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan asing khususnya yang paling banyak yakni

perusahaan yang berasal dari Jepang. Memang benar, atas hadirnya kebijakan tersebut, GDP nasional naik secara signifikan sebesar 42% sehingga memacu pertumbuhan lebih dari 7%. Sehingga atas itu, pemerintah telah merasa menapaki jalan yang benar dalam berbagai keputusan yang ditetapkan. Namun di pihak lain, utamanya mahasiswa merasa upaya perbaikan dengan hasil yakni pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut hanyalah semu belaka karena kesenjangan dalam masyarakat semakin lebar. Korupsi merajalela yang didukung *abuse of power* dari birokrat pemerintah yang juga melakukan tindakan kolusi secara masif. Kemiskinan semakin terlihat, apalagi ditunjang dengan represifitas negara sehingga kemudian menciptakan frustrasi dan kekecewaan dari kalangan mahasiswa. Ketidakadilan, kesenjangan, manipulasi, penderitaan rakyat semakin dirasakan. Sehingga hal-hal tersebut terakumulasi pada peristiwa Malari 1974.

Tragedi Malapetaka 15 Januari 1974 adalah puncak kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan politik dan ekonomi rezim Soeharto yang dinilai tidak hanya semakin menambah penderitaan rakyat tetapi juga memperlihatkan represifitas dengan otoritarianisme dan arogansi pemerintah (Usman, 1999). Atas kekecewaan tersebut dengan didukung oleh momentum kehadiran Perdana Menteri Jepang Tanaka sebagai simbol utama hadirnya kesenjangan sosial akibat investor asing, maka tindakan agresif dari anggota gerakan terjadi. Kerusuhan dengan pembakaran toko, mobil, dan kekerasan-

kekerasan yang lain menunjukkan bahwa asumsi dasar dari teori deprivasi relatif terbukti. Kefrustasian akibat kesenjangan tersebut akhirnya memunculkan tindakan yang melawan atau memberontak dari para peserta gerakan sebagai bagian dari masyarakat dengan harapan hak-hak untuk mendapat kesejahteraan dapat kembali diperoleh. Hal ini juga selaras bahwa deprivasi relatif tidak hanya terbatas pada persoalan tujuan dan keinginan yang berusaha diperoleh, namun juga berkaitan dengan tujuan yang menurut individu merupakan hak yang pantas diperoleh dan mesti dipenuhi kembali (Aribowo, 2020).

Selanjutnya, salah satu gerakan lain yang cukup membekas pada catatan memori pergerakan mahasiswa di Indonesia yakni Gerakan Reformasi 1998 dengan romantisme yang masih sering dikenang oleh mahasiswa hingga saat ini. Gerakan tersebut jika dianalisis juga muncul akibat hadirnya kekecewaan dari masyarakat akibat kesewenangan rezim orde baru. Ketidakpuasan dan rendahnya kepercayaan mahasiswa sebagai akibat atas semakin tidak terjaminnya kesejahteraan masyarakat dengan sebab penyelewengan para elit pemerintahan berujung pada hadirnya gerakan sosial yang mana atas gerakan ini, perubahan struktur kekuasaan terjadi setelah 32 tahun pemerintahan dipegang oleh pemimpin yang sama. Gerakan Reformasi 1998 ini terjadi dengan situasi berbondong-bondongnya berbagai elemen masyarakat utamanya masyarakat kelas menengah yang banyak diwakili oleh mahasiswa untuk menduduki gedung perwakilan di Senayan dengan tuntutan-

tuntutan pada rezim orde baru yang dapat dikatakan rezim yang cukup otoriter dalam menterjemahkan kekuasaan.

Berbondong-bondongnya individu sebagai bagian atas kelompok mahasiswa dengan kekecewaan dan keresahan yang ada dalam diri masing-masing juga menunjukkan bahwa teori gerakan sosial yakni teori deprivasi relatif dapat menjelaskan hal ini. Denton E. Morrison dalam penjelasan teori ini meyakini bahwa munculnya suatu gerakan sosial dan politik didasarkan atas hadirnya pengelompokan atau berkumpulnya orang-orang yang sedang mengalami deprivasi relatif (Aribowo, 2020), yang kemudian dengan itu digambarkan dengan berbondong-bondongnya mahasiswa untuk menuntut kehadiran reformasi dalam semua bidang. Dengan itu juga dapat dijelaskan sekaligus menyangkal bahwa gerakan sosial yang sebelumnya banyak diterjemahkan tidak serta merta lahir dari seseorang yang hina-dina dan tidak memiliki daya sama sekali sehingga membentuk suatu kelompok, melainkan gerakan sosial juga muncul dari kelompok sosial yang dalam contoh kasus ini yakni mahasiswa yang relatif berpengalaman dan menginginkan perubahan secara berkesinambungan.

Selain itu, akibat gerakan mahasiswa yang tercermin atas gerakan Malari dan Reformasi 1998 ini juga menunjukkan kehadiran perspektif dari teori politik yang ditawarkan oleh K. Polanyi dalam (Aribowo, 2020), bahwa K. Polanyi memandang gerakan sosial merupakan ekspresi individual yang diungkapkan

secara kolektif sebagai reaksi regulasi yang mendukung ekspansi kapitalis oleh negara seperti berbagai kebijakan yang pro kapitalis internasional yang menyebabkan Tragedi Malari 1974 dan tujuan pada usaha menumbuhkan kembali pengaturan-pengaturan yang demokratis oleh negara yang tercermin dari tuntutan pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Dalam hal ini, K. Polanyi sangat terlihat memberikan pandangan mengenai gerakan sosial dan politik dengan muara pada teori Marxian.

Selain pada teori psikologi dan teori politik itu, ketika melihat kembali pada kesimpulan sebelumnya bahwa gerakan mahasiswa dapat dilihat dalam analisis segala bentuk teori gerakan sosial dengan mengacu pada isu yang disuarakan, terlihat pada contoh-contoh yang akhir-akhir ini muncul bahwa gerakan mahasiswa dapat ditinjau dari teori yang lain. Gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan isu-isu yang disuarakan dalam tahun-tahun terakhir juga menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa dilakukan dengan tuntutan-tuntutan yang dapat dilihat dalam cakupan teori gerakan sosial baru. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa teori gerakan sosial baru ini tidak hanya menaruh fokus pada studi besar seperti gerakan petani, buruh, nasionalisme, dan lainnya, melainkan juga pada kajian gerakan hak asasi manusia, gerakan kebudayaan, gerakan perempuan, gerakan lingkungan hidup, dan gerakan kaum minoritas seperti kaum transgender (Aribowo, 2020). Contohnya gerakan mahasiswa yang menuntut pada protes terhadap UU Minerba. Para mahasiswa dalam aksinya ini juga memasukkan unsur

perjuangan dalam gerakan lingkungan hidup karena UU Minerba yang disahkan oleh pemerintah rezim reformasi ini disinyalir lebih memihak pada pengusaha batu bara tanpa memperhatikan ekosistem serta keberlanjutan pelestarian lingkungan dengan menyisihkan penguatan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Dengan itu pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa ini dapat dilihat juga menggunakan analisis teori budaya yang mana pendekatan ini menerangkan bahwa mahasiswa menekankan pada keyakinan tentang diri sendiri dan situasi sosial dan politik seseorang, serta menekankan pengalaman pendidikan dalam gerakan sosial dan masyarakat secara keseluruhan sehingga gerakan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai gerakan yang hanya mengekspresikan bentuk budaya. Atas itu dengan ini juga dapat disimpulkan bahwa berbagai gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa seringkali bersifat moralis, meskipun ranah pergerakannya seringkali menuju pada ranah yang politis. Mahasiswa cenderung bergerak atas kehendak dan kerisauan masyarakat banyak atau rakyat tanpa berusaha menempatkan diri untuk mencapai kekuasaan atau kedudukan politik tertentu. Meskipun dalam hal ini juga tidak dapat dipungkiri terkadang gerakan moralis yang terdiri atas individu mahasiswa sebagai bagian dari gerakan mengejar ketenaran pribadi yang mana ketenaran ini hadir sebagai keuntungan yang mendorong ia sebagai mahasiswa untuk terlibat dalam gerakan aksi yang

dilakukan. Sehingga atas bentuk diskursus ini, yakni antara moralis atau politis akan sedikit diuraikan pada sub bab selanjutnya.

Gerakan Mahasiswa Sebagai Kekuatan Politik

Pergerakan mahasiswa yang hadir di setiap pembabakan sejarah tentu memiliki peran yang besar dalam menjadi penyeimbang dan juga bahkan dalam melakukan perubahan struktur kekuasaan. Eksistensi pergerakan mahasiswa terus ada dan memiliki andil dalam setiap proses perpolitikan yang ada di Indonesia, sehingga Gerakan mahasiswa ini kemudian menjadi kekuatan politik tersendiri dan memiliki pengaruh yang besar dalam gerakan-gerakan reformis. Indonesia selalu melibatkan para mahasiswa dan juga para pemuda di dalam setiap perubahan sosial dari awal merdeka hingga sekarang.

Di setiap pembabakan pemerintahan, mahasiswa memiliki peran khusus dalam perkembangan suatu negara. Hal ini merupakan bukti bahwa mahasiswa menjadi faktor yang cukup penting dan diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik ataupun salah satu kekuatan yang mencerminkan adanya gerakan moral dengan melancarkan kritik terhadap pemerintahan sekaligus mengakomodir aspirasi masyarakat dengan mengamalkan idealismenya sebagai seorang mahasiswa. Walaupun tidak dapat dipungkiri, gerakan mahasiswa yang telah terjadi dan mengawal pemerintahan dari dulu hingga sekarang tentu masih menjadi misteri apakah pengaruh dan andil yang besar di setiap

perubahan sosial tersebut merupakan kekuatan dan gerakan moral mahasiswa yang murni merepresentasikan dari rakyat atautah kemudian hanya sebuah kekuatan politik yang dikelilingi oleh elit yang mengontrol gerakan dengan tujuan politis semata.

Idealnya, kekuatan mahasiswa merupakan kekuatan yang cukup mampu dalam menggerakkan juga melahirkan perubahan terhadap fungsi-fungsi pemerintahan dalam suatu negara agar tetap sejalan dengan sistem, nilai, dan tatanan yang sesuai. Terlebih dari itu pula, idealnya gerakan mahasiswa ialah kekuatan yang hadir dengan esensi sebagai salah satu simbol perlawanan rakyat yang menderita dan tertindas. Keduanya merupakan fungsi kontrol politik yang dimiliki mahasiswa ini merupakan sebuah kekuatan politik yang kerap kali ditempatkan di dalam percaturan politik yang ada di negara sehingga ikut menentukan arah bangsa. Terlepas daripada kekuatan politik tersebut merupakan kekuatan politik yang murni dari hasil gerakan mahasiswa atau dilatarbelakangi elite politik, gerakan mahasiswa tetaplah gerakan yang masif dan tentu pilihan tersebut tergantung dari motif mahasiswa itu sendiri dan mahasiswa yang kemudian mempertimbangkan sendiri gerakan tersebut ingin dibawa ke mana dan bagaimana merealisasikan komitmen tersebut kepada rakyat.

Melalui wawancara yang dilakukan peneliti, hal tersebut tepat dengan pernyataan narasumber yakni "*gerakan mahasiswa yang pernah saya ikuti tentu*

beberapa kali sempat dimanfaatkan oleh banyak sekali 'oknum' untuk tujuan lain seperti pencitraan belaka ataupun untuk konteks politik kampus sehingga melenceng dari substansi gerakan". Sehingga oleh karena itu, yang menentukan gerakan mahasiswa itu mau dibawa kemana adalah benar-benar mahasiswa itu sendiri yang kemudian menyadari konsekuensi dari pada pilihan yang akan diambil, apakah mahasiswa lebih menekankan kepada gerakan moral yang berfokus kepada pembelaan rakyat terhadap eksploitasi dan juga penindasan atau gerakan politik yang terarah untuk kemudian mobilisasi masyarakat, atau gerakan kepada tujuan tertentu. Ditambah pilihan lainnya yang tentu menjadi bahan dasar pertimbangan sebuah gerakan, apakah gerakan mahasiswa ini merupakan hal yang murni atas penindasan yang telah dialami oleh masyarakat atau hanya gerakan sintetis atas kemauan dan negosiasi politik dengan elit politik yang memiliki kekuatan lebih besar daripada mahasiswa, semua tergantung dari pada mahasiswa itu sendiri dan konsekuensi yang ingin mereka ambil.

Gerakan mahasiswa yang cenderung lebih membawa aksi-aksi yang memihak kepada rakyat dengan menentang pemerintah melalui energi yang kuat kemudian bisa menjadi faktor-faktor yang menentukan perubahan sosial dan juga diiringi dengan mobilisasi massa yang kuat pula sehingga mahasiswa memiliki peran di setiap pembabakan zaman dimulai pada era orde lama, dilanjutkan era orde baru, dan era reformasi seperti sekarang ini. Berbagai gerakan yang dilakukan

mahasiswa sebagai bentuk input terhadap negara dengan melemparkan kritik untuk pemerintah, misalnya seperti melakukan kajian-kajian akademis yang kemudian digunakan sebagai salah satu upaya untuk menghadirkan rekomendasi kebijakan dan atau dengan menciptakan gerakan-gerakan turun ke jalan sekaligus membangun mobilisasi massa bersama masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan menekan pihak tertentu dimana contoh kedua ini sifatnya cenderung lebih menyangkut fisik. Tentu bermacam bentuk gerakan oleh oleh kalangan intelektual mahasiswa ini sifatnya cenderung non formal sebab kekuatan yang dilahirkan dan dibangun bersifat *Civil Society* untuk kemudian memberikan pengaruh terhadap kekuatan lain dimana didalam ini merupakan pemerintahan.

Gerakan mahasiswa yang dilancarkan dan terjadi dalam setiap pembabakan sejarah pemerintahan akan dijabarkan guna memberikan komprehensivitas penjelasan atas bagaimana andil mahasiswa melalui gerakannya pada setiap orde kekuasaan yakni baik pada masa orde lama, era orde baru, dan juga reformasi. Dinamika-dinamika yang akan dipaparkan di dalam tulisan ini akan memberikan gambaran terkait dampak yang diberikan bagi mahasiswa terhadap pemerintah dan juga bagaimana respon dari pada rezim yang juga berbeda-beda di setiap Era sehingga kemudian dapat mengidentifikasi terkait apakah gerakan mahasiswa ini merupakan gerakan sosial yang berhasil secara moral ataupun kekuatan politik yang mampu mempengaruhi kekuatan lain dengan

ditopang faktor-faktor yang membuat gerakan mahasiswa menjadi begitu masif.

Gerakan Mahasiswa di Masa Orde Lama

Rezim orde lama berkuasa terhitung berkuasa dalam kurun 20 tahun dimulai dari tahun 1945 hingga 1965. Pada masa orde lama ini, setidaknya pemerintahan berjalan dalam dua babak, yakni masa demokrasi parlementer dan masa demokrasi terpimpin. Ketika ditelisik, secara umum babak awal perjalanan rezim orde lama dimulai dengan situasi dan kondisi dimana ekonomi, geopolitik, sosial, dan politik cukup stabil sebab narasi dan euphoria kemerdekaan masih terasa serta para kalangan pemuda juga memiliki peran penting dalam hal menjalankan aktivitas-aktivitas menuju kemerdekaan. Kemudian kelanjutannya, era orde lama beralih kedalam masa pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi parlementer dimana pada masa ini gejolak politik memenuhi kondisi dalam negeri. Gejolak tersebut muncul sebagai implikasi pergantian kabinet yang tidak berkesudahan, dimulai dari satu partai menuju partai lain. Sehingga atas itu, Soekarno kemudian memutuskan mengeluarkan Dekret yang melegalkan dimulainya masa demokrasi terpimpin pada saat itu. Pada babak kedua ini, yakni pada masa demokrasi terpimpin tersebutlah kemudian lahir kelompok-kelompok mahasiswa, utamanya kelompok mahasiswa yang kontra Soekarno. Kelompok tersebut mulai menciptakan dan membangun basis kekuatan demi dan untuk menyuarakan aspirasi atas kekalutan

yang tercipta pada tahun 1960an.

Secara sejarah, gerakan-gerakan mahasiswa di Indonesia tidak terlepas dari berdirinya berbagai macam organisasi kemahasiswaan. Beberapa di antaranya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang didirikan oleh sekelompok mahasiswa di Yogyakarta, salah satunya adalah Lafran Pane pada tanggal 5 Februari 1947. Organisasi ini berlandaskan pada nilai-nilai ideologi Islam. Kemudian, pada tanggal 23 Maret 1954, berdiri pula organisasi mahasiswa dengan basis ideologi Marhaenisme, suatu pemikiran yang dilandasi oleh pemikiran Soekarno mengenai kaum Marhaen, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Beberapa organisasi berbasis ideologi kiri lainnya juga turut berdiri, seperti GAMSOS, sebuah organisasi mahasiswa yang merepresentasikan ideologi sosialisme. Organisasi berhaluan ideologi komunis juga ikut didirikan, yakni Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMNI), yang pada berkembangannya mempunyai hubungan atau relasi yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia. Dengan demikian, pada masa awal perkembangan orde lama, organisasi mahasiswa yang banyak tumbuh di kampus-kampus banyak diilhami oleh pemikiran nilai serta ideologi yang ada pada saat itu. Dengan wadah organisasi dengan bentuk ekstra kampus, mahasiswa-mahasiswa ini senantiasa berhimpun untuk mengembangkan nilai-nilai yang dianutnya.

Pertentangan antar mahasiswa

kemudian sering kali terjadi pada masa ini. Perebutan kursi-kursi di Senat Mahasiswa, maupun di ruang publik di kampus sering kali terjadi. Pertentangan ini biasanya berlangsung di antara kalangan mahasiswa kanan dan juga mahasiswa kiri. Krisis ekonomi, politik, dan demokrasi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Soekarno pada babak demokrasi terpimpin juga turut menjadi bahan bakar penggerak gerakan mahasiswa, terutama organisasi mahasiswa yang tidak pro dengan Soekarno. Pembangunan berbagai proyek mercusuar yang dibarengi dengan kemandegan politik, sekaligus juga kondisi harga pokok yang semakin naik dan perekonomian yang tidak stabil. Kondisi ini melahirkan sebuah situasi deprivasi relatif yang secara kolektif dialami oleh berbagai elemen masyarakat. Pada kondisi ini, mahasiswa pun tidak terlepas dari dampak tersebut. Biaya hidup cenderung semakin naik, juga tarif moda transportasi yang ikut mahal, menjadikan banyak dari kalangan mahasiswa geram dengan situasi yang terjadi pada masa itu.

Kondisi ini semakin memuncak, apalagi ketika pada akhir zaman Orde Lama, terjadi sebuah peristiwa mencekam yakni Gerakan 30 September (G30S) dimana pihak militer (angkatan darat) menganggap peristiwa ini didalangi oleh PKI dan *underbouw*-nya. Dengan semangat anti pemerintahan Soekarno dan anti PKI, terbentuk suatu gerakan mahasiswa bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang digagas pada tanggal 10 hingga 23 Oktober 1965. KAMI inilah yang merupakan sebuah organisasi

yang diusung oleh mahasiswa untuk menekan pengaruh PKI, kelompok-kelompok komunis, serta pihak yang pro Soekarno. Didukung oleh beberapa pihak seperti beberapa elemen dari 'pemerintah', militer (Angkatan Darat), Pemuda ansoor dan juga politisi-politisi sosialis juga mendukung gerakan mahasiswa, gerakan ini melawan dengan usaha untuk memberikan tekanan terhadap pemerintahan Soekarno pada saat itu dengan menyuarakan Tritura, atau Tri Tuntutan Rakyat. Gerakan mahasiswa yang dilakukan pada babak ini dikenal dengan nama angkatan'66.

Beberapa tokoh yang terkenal tergabung dalam angkatan 66 adalah Cosmas Batubara, Abdul Ghofur, Zamroni, David Napitupulu yang kemudian menjadi pelopor pergerakan berbagai demonstrasi yang menentang pemerintahan hingga dimana pada akhirnya Presiden Soekarno menemui mahasiswa-mahasiswa tersebut di Istana Negara. Di dalam istana juga mahasiswa melalui KAMI dan presiden tidak menemui titik temu sehingga kemudian delegasi dipersilakan untuk kembali tetapi mahasiswa tidak akan pulang sebelum PKI telah dibubarkan. Soeharto kemudian keluar dan bertemu dengan mahasiswa sambil mengatakan bahwa PKI sudah dibubarkan dan pada 25 Februari 1966 KAMI dinyatakan dibubarkan. Aktivis KAMI kemudian memperoleh jabatan di orde baru karena telah membantu Presiden Soeharto untuk memberangus pengaruh komunisme dan meruntuhkan orde lama. Inilah yang kemudian seringkali mensinyalir kuatnya

narasi bahwa tujuan gerakan sejak dulu adalah gerakan yang politis dengan tujuan peserta aksi itu sendiri untuk mendapatkan jabatan pemerintahan.

Namun tetap, dengan melihat gerakan tersebut dalam konteks gerakan sosial, angkatan '66 lahir dari suatu kondisi deprivasi relatif yang turut menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia secara kolektif. Hal ini kemudian membuat mahasiswa yang pada saat itu merupakan segelintir kelompok masyarakat yang memiliki *privilege* lebih dalam mengenyam pendidikan dan ide-ide perubahan, turut tergerak dalam memobilisasi massa untuk melakukan aksi-aksi demonstrasi dalam menekan pemerintahan Soekarno. Diakomodasi oleh organisasi-organisasi yang telah terbentuk pada dekade kedua tahun sebelumnya, gerakan mahasiswa yang tergabung pada angkatan '66 ini kemudian mencoba untuk menggunakan segala macam sumber daya yang mereka miliki untuk mengorganisir aksi mereka. Kerja sama lintas kelompok juga turut dilakukan oleh gerakan mahasiswa ini, hal tersebut tercermin dari penjelasan bahwa mahasiswa pada masa itu juga turut dibantu oleh beberapa pihak yang pada saat itu anti komunis dan kontra Soekarno.

Selain melihat dari adanya deprivasi relatif, gerakan mahasiswa pada orde kekuasaan Soekarno ini juga dilaksanakan dengan melakukan rapat-rapat, serta koordinasi dengan organisasi mahasiswa lainnya yang memiliki kesamaan misi, gerakan pada masa ini dalam konteks gerakan sosial dapat dikatakan sebagai

gerakan sosial lama. Hal tersebut dikarenakan isu-isu yang disuarakan, dalam Tritura, cenderung berlandaskan ekonomi maupun materi, yang pada saat itu sedang mengguncang stabilitas Indonesia.

Gerakan Mahasiswa di Masa Orde Baru

Mahasiswa pada masa Orde Baru erat dengan tradisi politik oposisi sejak awal tahun 1970-an. Pada masa ini, mahasiswa mengorganisir diri secara kolektif dengan tujuan guna melancarkan protes terhadap pemerintahan presiden Soeharto di berbagai sektor dan beragam isu-isu seperti problem terkait korupsi penyelenggara negara, Pemilihan Umum 1971 yang tidak adil sebab adanya berbagai kecurangan yang telah terorganisir, serta isu terkait dengan pemborosan uang negara melalui proyek-proyek seperti Taman Hiburan yakni Taman Mini Indonesia. Atas itu, berbagai pengawalan dengan tindakan protes-protes yang dilancarkan oleh mahasiswa pada masa Orde Baru dilancarkan secara bergelombang dari tahun ke tahun. Meskipun sebetulnya kekuatan mahasiswa pada masa itu dinilai sangat kecil juga sangat tidak sebanding dengan pemerintahan Presiden Soeharto yang begitu kuat pada era itu. Namun pada perkembangan selanjutnya, mahasiswa berhasil menggusur rezim orde baru pada tahun 1998.

Fenomena yang terjadi di pada saat itu adalah rezim orde baru yang dimana merupakan kekuatan yang besar dan menjadi rezim yang memiliki persiapan-persiapan yang cukup cermat untuk

menekan kritik sehingga kemudian mahasiswa enggan melakukan hinaan atau kritik secara eksplisit dan berusaha untuk mengkritik rezim dengan cara memberikan koreksi dan juga peringatan kepada pemimpin. Hal tersebut kemudian yang menjadi dasar dari pada Arief Budiman 1970-an untuk menginisiasi Mahasiswa Menggugat yang mana peran mahasiswa di sini ialah memiliki tanggungjawab untuk mengkoreksi pemerintah apabila langkah-langkahnya yang tidak pro rakyat dan belum memiliki perencanaan untuk bersekongkol kepada kekuatan lain untuk menggulingkan pemerintahan pada saat itu. Arif Budiman juga membuat seruan dengan kampanye golput sekaligus menginisiasi berbagai gerakan untuk melawan kejahatan moral lainnya yang terjadi selama pemerintahan orde baru berkuasa. Akan tetapi gerakan-gerakan yang diserukan ini, pada realitasnya hanya sebatas kampanye yang tidak sampai pada tindakan untuk mobilisasi massa yang begitu masif sehingga mampu memberikan tekanan pada pemerintahan.

Pada perjalanannya, gelombang protes yang berasal dari kalangan mahasiswa kemudian mulai memuncak ketika peristiwa Malari 1974 dimana peristiwa itu disebabkan karena kebijakan ekonomi politik yang digagas oleh rezim orde baru sangat merugikan masyarakat ditambah kehadiran Perdana Menteri Jepang yakni PM Tanaka yang dinilai mahasiswa sebagai simbol kapitalisme menjadikan nuansa panas aksi-aksi mahasiswa sehingga menimbulkan korban jiwa yakni 9 orang meninggal juga 23 orang yang terluka

akibat peristiwa tersebut. Dengan itu, berbagai kebijakan ekonomi yang tidak pro terhadap rakyat inilah yang kemudian mendasari pergerakan mahasiswa pada saat itu. Jika mengacu kepada teori gerakan, gerakan sosial lama berorientasi pada beberapa aspek seperti ekonomi dan kebutuhan materi (Wahyudi, 2010). Hal ini menunjukkan gejolak ekonomi dan kebutuhan materi pada masa itu menyebabkan gerakan sosial oleh mahasiswa kemudian muncul.

Pergerakan mahasiswa pada zaman Orde Baru juga memiliki perbedaan terhadap pola-pola mahasiswa ketika orde lama. Apabila ketika zaman Orde Lama para mahasiswa biasanya lebih dekat dengan kekuatan militer dalam hal ini adalah Angkatan Darat untuk melakukan pergerakan tetapi justru pada zaman Presiden Soeharto mahasiswa justru sangat jauh dengan militer dan tidak memiliki hubungan yang baik dalam melakukan pergerakan pergerakan antara mahasiswa dengan militer hal tersebut kemudian menimbulkan gap antara visi Presiden Soeharto yang yang mempercayai bahwa stabilitas politik harus diciptakan dengan berbagai cara salah satunya dengan menekan suara-suara sumbang yang ada pada mahasiswa sehingga kritik terus dilakukan tetapi di sisi lain Presiden Soeharto percaya untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas politik yang mereka yakini.

Hal tersebut kemudian berujung pada pembungkaman kritik secara institusional, yang dilakukan oleh Presiden Soeharto

melalui larangan politik masuk kampus yang dilakukan oleh Mendikbud pada saat itu Daoed Joesoef sebagai salah satu bentuk untuk menekan kegiatan-kegiatan politik dalam kampus yang dalam hal ini diskusi-diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan hal yang berpotensi untuk menekan pemerintah ke depan. Rezim orde baru usaha menjaga keamanan nasional dan stabilitas politik dengan harapan akan memberikan dampak terhadap situasi perekonomian yang menjadi stabil sehingga peminjaman modal kepada asing menjadi lebih mudah dilakukan dan percepatan serta pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat pesat. Aktivis mahasiswa yang ada pada Orde Baru terbagi menjadi 3 spektrum yang pertama adalah mahasiswa-mahasiswa yang beraliran liberal populis, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang berbasis agama Islam dan yang terakhir adalah aktivis mahasiswa yang menitikberatkan kepada gerakan kiri dan marxisme.

Moda pergerakan pada masa orde baru memang terasa kurang mendukung terbentuknya gerakan. Dengan minimnya sokongan dari kelompok-kelompok yang sebelumnya mendukung gerakan mahasiswa, seperti pada angkatan '66, membuat gerakan mahasiswa pada masa ini cenderung kurang kuat. Hal ini terlihat dari keluarkannya kebijakan normalisasi kehidupan kampus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, pasca terjadinya peristiwa Malari di tahun 1970 yang sebelumnya dianalisis menggunakan teori deprivasi relatif yang telah dijabarkan pada sub bab

sebelumnya.

Gerakan Mahasiswa di Masa Reformasi

Menjelang berakhirnya era Presiden Soeharto mahasiswa yang melakukan protes kemudian semakin masif dan semakin besar baik secara proporsi dan juga ruang lingkup. Yang dimaksud adalah mahasiswa yang biasanya hanya berdemonstrasi di Jakarta dan Bandung, gerakan mahasiswa setelah itu kemudian meluas menjadi tersebar di berbagai kota-kota kata lainnya seperti Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya hingga Mataram dan Bali utamanya pada era 1990-an. Proses yang kian meningkat karena mahasiswa tidak bisa terus-terusan untuk bersembunyi dan terus diintimidasi oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang berusaha menekan suara mahasiswa di kampus. Berbagai kasus-kasus HAM di era akhir jabatan masa Presiden Soeharto dan banyak sekali pemberedelan yang dilakukan pemerintah terhadap kantor berita, menyebabkan mahasiswa memiliki orientasi yang kuat untuk memperjuangkan keadilan sesuai dengan teori gerakan sosial dengan paradigma baru, dimana gerakan sosial baru berhubungan dengan orientasi gerakan yang turut berjuang dalam isu-isu baru, seperti: keadilan dan persamaan hak, *human rights*, lingkungan hidup, gender, perdamaian, dan lain sebagainya.

Kemudian berbagai fenomena-fenomena seperti penculikan misterius mahasiswa dan batasan-batasan politik mahasiswa yang dilakukan oleh pemerintahan kemudian menimbulkan

pembangkitan oleh mahasiswa di kampus-kampus di seluruh negeri pada saat itu sehingga kemudian embrio angkatan 1998 lahir dengan melakukan berbagai demonstrasi publik dan kelompok-kelompok belajar informal yang kemudian berjejaring satu sama lain serta membentuk berbagai asosiasi lembaga swadaya masyarakat dan juga pers, misalnya, *Politika* dari Universitas Nasional Jakarta, *Ganesha* dari Institut Bandung *tute of Technology* [ITB, *Institut Teknologi Bandung*] dan *Arena* dari Institut Negara untuk Studi Islam (Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga yang bertempat di Yogyakarta).

Jika ditinjau dari teori gerakan sosial yang ada maka orientasi gerakan mahasiswa ketika reformasi yakni dengan melancarkan aksi untuk melakukan perubahan terhadap tananan dan struktur yang telah ada serta berusaha untuk merubah berbagai kebijakan pada sektor negara yang dinilai tidak memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai demokrasi dan semangat reformasi. Rasa ini tentu didasari oleh situasi pada masa orde baru yang penuh dengan ketidakadilan dan pemerintahan yang tidak demokratis. Karena masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan Orde Baru, hal tersebut kemudian membangkitkan semangat gerakan mahasiswa dan reformasi pun meletus. Disebutkan bahwa ketika ketidakpuasan terhadap sumber daya dan peluang tertentu terjadi secara menyeluruh dengan melibatkan pihak lain, maka akan dapat terbentuk suatu identitas bersama bahwa mereka memiliki kesamaan

ketidakpuasan, sehingga tergerak dalam melakukan tindakan kolektif (Klandermans, 2005).

Pasca peristiwa reformasi meletus, kelompok masyarakat sipil beserta organisasi akar rumput seperti LSM aksesnya tidak lagi dibatasi oleh birokrasi politik atau pemerintah sehingga kemudian kerap kali mengekspresikan sesuatu kepada pemerintahan. Keberadaan kondisi meningkatnya pembaruan teknologi sekaligus munculnya pergeseran nilai dalam masyarakat misalnya munculnya pengakuan kelompok minoritas dan isu-isu terbarukan lainnya. Hal ini kemudian sejalan dengan faktor yang telah dijabarkan dalam teori gerakan yaitu faktor neutral, yang dimana faktor neutral menjadi salah satu sebab dari adanya sebuah perubahan sosial secara menyeluruh.

Pada orde reformasi ini, semua berhak untuk mengekspresikan aspirasi mereka dan pada hal ini mahasiswa dirasa telah memiliki kekuatan yang berkurang untuk menyuarakan sesuatu kepada pemerintah pasca reformasi. Hal tersebut dikarenakan normalisasi kehidupan kampus setelah permusuhan yang begitu panjang terhadap pemerintah yang membuat kemudian mahasiswa tidak memiliki cita-cita untuk menjadi oposisi, hanya posisi universal yang mungkin menurut Samuel Huntington dalam (Sebastian, 2014) masih tetap berlaku di era pasca reformasi. Namun yang perlu ditekankan dengan perkembangan berbagai gerakan tersebut menunjukkan bahwa gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan berbagai isu yang dibawa

menunjukkan hadirnya pola gerakan sosial baru hingga pada titik analisis menggunakan teori budaya yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Akan tetapi hal yang dapat disangkal ialah pada era ini, fenomena lahirnya gerakan mahasiswa juga tetap menunjukkan eksistensinya dengan konsep-konsep gerakan sosial baru dimana isu yang dibawakan cenderung beragam. Kelompok kolektif yang berisi mahasiswa untuk melakukan gerakan tersebut cenderung mendasarkan arah gerakannya sesuai dengan kesadaran fungsi dan peran sebagai mahasiswa. *“alasan utama terlibat ialah saya menyadari bahwa sebagai seorang mahasiswa dengan predikat yang melekat kepadanya yakni sebagai agent of change, social control, dan iron stock memiliki kewajiban untuk membela kaum tertindas, melawan kezaliman dan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, sehingga menimbulkan kerugian baik secara sosial maupun kelestarian lingkungan.”*

Contoh-contoh gerakan mahasiswa pada tahun-tahun terbaru ini memang seringkali berorientasi pada gerakan sosial baru. Misalnya, gerakan demonstrasi untuk advokasi Pedagang Kaki Lima, demonstrasi terkait fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto, demonstrasi terkait dengan konflik lingkungan dan agraria di Waduk Sepat Surabaya, juga demonstrasi dengan tuntutan atas adanya Undang-Undang yang dinilai semakin menindas rakyat. Melalui hal itu pada dasarnya gerakan mahasiswa memiliki arah gerak yang moralis sekalipun banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak

dalam ranah politis. Sayangnya, pada era ini dengan kemunculan Partai Politik Mahasiswa cenderung mencerminkan adanya pergeseran sekalipun belum tampak dalam realitasnya.

IV.KESIMPULAN

Gerakan mahasiswa pada akhirnya tidak hanya bergerak pada ranah intelektual belaka tetapi juga menentukan dan menjadi aktor penggerak dari pada setiap perubahan sosial. Mahasiswa yang memiliki kecenderungan terhadap isu sosial dan politik tentu terus berpartisipasi terhadap perubahan dan intelektualitas yang dimiliki mahasiswa pada akhirnya tidak membuat mereka menjadi mudah puas terhadap sesuatu. Sifat dasar mahasiswa tersebut yang kemudian menunjang gerakan mahasiswa yang begitu masif serta menjadi salah satu kelompok politik yang mampu menekan dan juga gerakan moral yang menjunjung tinggi moralitas atau kesesuaian terhadap fungsi dan tatanan yang telah ada. Gerakan mahasiswa yang ada di setiap zaman baik dalam Orde Lama, Orde Baru dan juga Reformasi memiliki ciri tersendiri dalam melakukan sebuah gerakan sosial. Dengan itu setiap gerakan mahasiswa dapat dianalisis menggunakan berbagai kekayaan teori pada studi gerakan sosial dan politik. Contohnya gerakan Angkatan '66, gerakan yang berujung pada peristiwa Malari 1974, dan gerakan Reformasi 1998 yang dapat ditinjau dari gerakan sosial lama dan teori deprivasi relatif serta gerakan mahasiswa akhir-akhir ini yang lebih menunjukkan gerakan sosial baru hingga dapat dianalisis menggunakan

pisau teori budaya.

Kemudian dengan itu, orientasi gerakan memiliki warna tersendiri daripada mahasiswa dalam bergerak di setiap era kemudian dapat dilihat dari bagaimana mereka melakukan aksi publik serta dampak yang dihasilkan dan juga respon mereka terhadap ketidakadilan dan juga ketidaksesuaian yang ada di dalam pemerintahan dan negara. Gerakan mahasiswa yang mewarnai pembabakan sejarah di dalam pemerintahan dan jalannya negara Indonesia kemudian memberikan dinamika tersendiri yang kemudian pada akhirnya mengerucut kepada sebuah gerakan sosial yang menjunjung tinggi moral maupun kekuatan politik yang mempengaruhi kekuatan lain sehingga kemudian mampu menjadi sebuah gerakan yang efisien dan efektif. Sehingga dengan itu pula, gerakan mahasiswa juga lebih menunjukkan sebagai tipe gerakan moralis, bukan politis meskipun itu tergantung pada pilihan dari mahasiswa itu sendiri.

Penelitian terkait arah gerak mahasiswa ini menekankan atas saran untuk tetap memperkuat gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral yang membela kepentingan rakyat. Untuk rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya, kiranya kehadiran Partai Politik Mahasiswa dan perpecahan aliansi mahasiswa di era saat ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk lebih dalam ditelisik.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, F. (1985). *Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia*

dan Negara. Jakarta: Inti Sarana Aksara.

- Akbar, I. (2016). *Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)*. *Jurnal Wacana Politik, 1(2)*, 107-115. <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/11052/pdf>
- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana.
- Aribowo. (2020). *Peta Teori Gerakan Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Budiman, A. (1978). *The Student Movement in Indonesia: A Study of the Relationship between Culture and Structure*. *Asian Survey, 18(6)*, 609-625. <https://online.ucpress.edu/as/article-abstract/18/6/609/21369/The-Student-Movement-in-Indonesia-A-Study-of-the-redirectedFrom=fulltext>
- Burgess, P. M. & Hofstetter, C. R. (1971). *The "Student Movement": Ideology and Reality*. *Midwest Journal of Political Science, 15(4)*, 687-702. <https://www.jstor.org/stable/2110048>
- Curran, D. J. and Renzetti, C. M. (1990). *Social Problems (2nd ed)*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Jazimah, I. (2013). *MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru*. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, 3(01)*. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/view/902>
- Jenjins, J. C. (1983). *Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements*. *Annual Review of Sociology, 9*, 0527-553. https://www.researchgate.net/publication/234838252_Resource_Mobilization_Theory_and_the_Study_of_Social_Movements
- Klandermans, B. (1997). *The Social Psychology of Protest*. Oxford: Blackwell.
- Lipset, S. M. (1968). *Student and Politics in Comparative Perspective*. *Daedalus, Students and Politics, 97(1)*, 1-20. <https://www.jstor.org/>

- [stable/i20023793](#)
- Lipset, S. M. & Altbach, P.G. (1969). *Student in Revolt*. Boston: Houghton Muffin & Co.
- Maiwan, M. (2016). Hegemoni, Kekuasaan, Dan Gerakan Mahasiswa Era 1990-an: Perspektif Dan Analisa. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(1), 49-69. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb>
- Meyer, D. S. dan Whitter N. (1994). Social Movement Spillover. *Social Problems*, 41(20), 277-298. <https://www.jstor.org/stable/3096934>
- Rosyad, R. (2006). *A Quest for True Islam: A Study of the Islamic Resurgence Movement among the Youth in Bandung, Indonesia*. Canberra: ANU Press.
- Sanit, A. (1999). *Gerakan Mahasiswa 1970-1973, Pecahnya Bulan Madu Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sanit, A. (1999). *Pergolakan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Sanit, A. (1981). *Sistim Politik Indonesia*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali.
- Sarlito W, et al. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sebastian, L., Chen, J., & Syailendra, E. (2014). PEMUDA RISING: WHY INDONESIA SHOULD PAY ATTENTION TO ITS YOUTH. *Singapore Rajaratnam School of International Studies*. <https://www.jstor.org/stable/resrep05897.7?seq=1>
- Setiadi, E. M. dan Kolip, U. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Bandung: Prenamedia Group.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Sulistyo, H. (ed). (1988). *Politik dan Mahasiswa: Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*. Jakarta: Yayasan API dan PT. Gramedia.
- Usman, S. (1999). "Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik Ataukah Gerakan Moral?" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 146-163. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11136/8377>
- Wahyudi. (2010). Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani [studi Kasus Gerakan Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) 0Kalibakar, Malang Selatan']. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. 12(1). <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/162>